

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Indriyanto Seno. 1997. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media.
- Adji, Indriyanto Seno. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.
- Agustina, Shinta. Dkk. 2018. *Penjelasan Hukum Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: LelP.
- Arief, M. Irsan. 2022. *Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan dan Diskresi Antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana/Korupsi*. Jakarta: Merka Cipta Lestari.
- Elpah, Dani. 2016. *Pengkajian Titik Singgung Kewenangan Antara PTUN dengan Pengadilan TIPIKOR Dalam Menilai Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang*. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Ferry, Hernold. 2014. *Kerugian Keuangan Negara*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Hadjon, Philipus. Dkk. 2012. *Hukum Admnistrasi dan Good Governance*, Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- H.R, Ridwan. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indroharto. 2002. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Ilyas, Anshory Dkk. *Kontrak Publik*. Prenada Media. Jakarta. 2021.
- Latief, Abdul. 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, cetakan pertama, Jakarta: Prenada Media Group.
- Latief, Abdul. 2016. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group.

- Minarno, Nur Basuki. 2009. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Palangkaraya: Laksbang Mediatama.
- Minarno, Nur Basuki. 2009. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Leksbang Mediatama.
- M, P. Hadjon. Dan Djatmayati, T. S. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- R, Wiyono. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, Yudhi. Boedi Djatmiko Hadiatmodjo. Dan Imam Ropli. 2021. *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Soebandi, Imam. Dkk. 2014. *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Press.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. 2003. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat. 1978. *Rancangan Undang Peradilan Administrasi*. Jakarta: BPHN.
- Supandi, Hukum Peradilan tata Usaha Negara, Bandung Alumni, 2016
- Tim JDIH Pusat BPK. 2017. *Wewenang Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014*. Jakarta: BPK RI.
- Utrecht, E. 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Emas.

Jurnal

- Anggoro, Fima Novi. "Penguujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan oleh PTUN", Lampung Fiat Justisia, 2016.

- Asmayandi. *“Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Hukum Kewenangan Diskresi Oleh Pemerintah Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”*. Jurnal Ganec Swara Volume. 15 Nomor 2. September 2021.
- Basah, Sjachran. *“Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia”*. Alumni. Bandung. Tahun 1985.
- Elpah, Dani. *“Pengkajian Titik Singgung Kewenangan Antara PTUN dengan Pengadilan TIPIKOR Dalam Menilai Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang. dalam Budi Suhariyanto. Persinggungan Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Diskresi Antara Pengadilan TUN dan Pengadilan Tipikor”*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 7 Nomor 2. Juli 2018.
- Faiz, Arfan dan Muhlizi. *“Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi”*. Jurnal Rechts Vinding. Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012.
- Fakhrullah, Zudan Arif. Dan Wahyu Agam, *“Diskursus Penyalahgunaan Wewenang Bagian Dari Tindak Pidana Korupsi”*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla, Jakarta.
- Fathudin, *“Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)”*, Jurnal Cita Hukum Vol. II, No.1, Juni 2015.
- Halawa, Firman. *“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014”*. Jurnal Sosial dan Ekonomi. Volume 1 Issue 1. tahun 2020.
- Irawan, Benny. *“Diskresi sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi dan Hukum terhadap Fenomena Pejabat Otoritas”*. Jurnal Mimbar Vol XXVII No 2.
- Ilyas, Amir, *Peranan Pusat Pelaporan Dan Analis Transaksi Keuangan Dalam Pemberantasan Money Laundry*. Jurnal Amanna Gappa. Vol 19. Nomor 3. September 2011.
- Nirwanto, Andi. *“Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)”*. Jakarta: Makalah HUT IKAHI Ke 62. 2015.

- Razak, Abd Dkk. *Harmonization and Synchronization of Laws Related to Management Authority of Coastal Marine Areas*, Sch Int J Law Crime Justice Schlars Middle East Publishers. United Arab Emirates Journal homepage: <https://saudijournals.com/sijcj>.
- Rini, Nicken Sarwo. “*Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi*”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 18 Nomor 2. 2 Juni 2018.
- Sahlan, Muhammad. “*Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*”, Jurnal Arena Hukum, Volume 9 No 2 Agustus 2016.
- Supadi dan Wahyu Agam, “*Diskursus Penyalahgunaan Wewenang Bagian Dari Tindak Pidana Korupsi*”. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla, Jakarta.
- Sutrisno dan Ibnu Artadi, “*Implementasi Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya Uu No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*”, Jurnal Hermeneutika Vol. 3, No. 2 Agustus 2019
- Yulius. “*Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014*”, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume IV No 3, November 2015.
- Zega, Kevin D. *Titik Singgung Tindak Pidana Korupsi dengan Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: MaPPI FH UI.

Perundang-Undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Internet

<https://repository.unib.ac.id/7807/2/Artikel%20Iskandar%20FH%20Bengku%20lu.pdf>

<https://iainptk.ac.id/tiga-wujud-penyalahgunaan-wewenang-dalam-hukum-administrasi/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/penyebab-hakim-tipikor-kesempingan-putusan-mk-lt5708540e0e639/>

<https://pdfcoffee.com/hukum-administrasi-negara-uu-administrasi-pemerintahan-pdf-free.html>

<http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>